

## Sidang Etik Harusnya Tak Berhenti Meski Lili Mengundurkan Diri

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menilai sidang etik kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang melibatkan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar harus dilanjutkan.

Dia berpandangan, sidang etik semestinya tidak berhenti hanya karena Lili sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Lalu tindak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya enggak, Pas Bos. Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusnya tolong dong kasih tahu saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Dia juga akan menanyakan dasar hukum terkait keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menggugurkan sidang etik Lili. Bambang tak berpendapat jika sidang etik digugurkan dengan mundurnya Lili.

"Nanti kita tanyakan

dasar hukumnya apa. Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa (sidang etik dihentikan)," ujarnya.

La mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pegangannya. Terkait tindak pidana korupsi, Pacul menyinggung UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus Lili, Pacul menilai publik menyoroti adanya dugaan gratifikasi yang tercantum dalam UU tersebut. Sehingga, dia memandang, sidang etik harus tetap dilanjutkan untuk mengetahui benar atau tidaknya Lili terlibat gratifikasi.

"Pasal 12 kok, gratifikasi. Tinggal gratifikasi diterima awal atau diterima akhir. Kalau diterima awal gratifikasi itu namanya pasalnya 12 a, diterima akhir 12 b. Sama-sama melanggar pasal kan gitu. Pasal Undang-undang Korupsi nomor 19 bos, ada ini," ujar Pacul. ● han

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## Jokowi Tegur Zulhas yang Bagikan Migor Sambil Kampanye untuk Anaknya

Aksi Mendag, Zulkifli Hasan yang kampanye untuk anaknya, Putri Zulya Savitri, saat sosialisasi harga minyak goreng (migor) dinilai sangat tidak etis.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang membagikan minyak goreng (migor) gratis kepada warga tapi sambil kampanye untuk anaknya, Putri Zulya Savitri.

Pada saat acara PANsar murah di Lampung pada Sabtu (9/7), Zulhas, sapaan akrabnya, meminta supaya masyarakat memilih anaknya, yakni Putri Zulya Savitri.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi 14 ribu atau di bawah 14 ribu. Paling penting itu, tugas dari saya itu," ujar Jokowi di Pasar Sukamandi, Subang Jawa Barat, Selasa (12/7).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan

bahwa dalam kunjungan kerjanya, dirinya menyempatkan untuk ke pasar-pasar tradisional mengecek harga-harga termasuk minyak goreng.

"Jadi ke pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun sama mengecek minyak goreng utamanya ini yang kita cek itu minyak curah loh ya. Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka di 14 ribu atau di bawahnya," kata Jokowi.

"Kalau yang saya datang pasar-pasar sudah di angka Rp14 ribu. Kalau di luar Jawa ada di atas Rp 14 ribu ya satu persatu kita selesaikan," tambahnya. Selain itu, Jokowi juga

menegur menteri lainnya untuk tetap fokus bekerja. Utamanya bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan terkait energi dan pangan.

"Sama, semuanya (menteri) harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM, berkaitan dengan energi batu bara semuanya karena dunia terdistribusi di energi dan pangan jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleceh di dua bidang ini," ungkapnya.

Dalam video yang sempat viral, Zulhas membagikan minyak goreng gratis pada saat acara PANsar murah di Lampung pada Sabtu (9/7). Dalam pembagian minyak itu, disisipkan kampanye untuk mendukung anaknya Putri Zulya Savitri.

## SIDANG PRAPERADILAN MARDANI H MAMING

Kuasa hukum Mardani H Maming, Bambang Widjojanto (kedua kanan) dan Denny Indrayana (kanan) berdiskusi usai mengikuti sidang gugatan terkait penetapan tersangka Mardani H Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (12/6). Mantan Bupati Tanah Bumbu yang juga Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming menggugat KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011.



JELANG PERTEMUAN FMCBG - FCBD G20 Dua wisatawan melintas di samping poster kegiatan Pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) dan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Selasa (12/7). Pertemuan rangkaian Presidensi G20 tersebut akan berlangsung 13-16 Juli 2022 di kawasan Nusa Dua.

## Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies

JAKARTA (IM) - Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei elektabilitas tokoh politik jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Dalam hasil survei disebutkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tertinggi.

Kemudian disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di posisi kedua, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi ketiga.

Hasil peringkat tersebut berasal dari pertanyaan top of mind atau berbasis pertanyaan terbuka.

"Hasil ini dengan pertanyaan terbuka jika pemilihan presiden dilakukan saat ini dan Presiden Jokowi tidak boleh ikut mencalonkan diri kembali. Siapa tokoh nasional yang akan dipilih menjadi presiden Republik Indonesia," ujar Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno dalam konferensi pers virtual, Selasa (12/7).

Hasil survei mengungkapkan, Ganjar mendapatkan 25,4 persen suara responden, kemudian 19,0 persen dimiliki Prabowo dan 17,8 persen untuk Anies Baswedan. Urutan keempat ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 7,9

persen, selanjutnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 3,4 persen, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 2,9 persen, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan 1,5 persen.

Sedangkan tokoh di bawah 1 persen ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan 0,9 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 0,8 persen, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 0,3 persen.

Kemudian, Muhaemin Iskandar, Salim Segah Al Jufri, Sri Muliani, Fahri Hamzah masing-masing 0,1 persen. Untuk metode survei dilakukan dengan telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh enumerator terlatih akibat dari kondisi Covid-19 yang mulai meningkat di beberapa daerah. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden pada penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah yang merupakan penduduk yang memiliki hak pilih. Waktu survei dilakukan pada 15-29 Juni 2022 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,9 persen. ● mei

## Waketum Klaim PKB Makin Lengket dengan Gerindra, bak Lebah dan Bunga

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengklaim PKB semakin lengket dengan Partai Gerindra. Diketahui, keduanya telah sepakat berkoalisi untuk Pemilu 2024.

"Sampai hari ini, PKB memang sedang bekerja sesuai dengan pertemuan antarstruktur, baik provinsi maupun cabang PKB Gerindra hari-hari ini ya bekerja sama bareng-bareng juga. Makin lengket," ujar Jazilul saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7).

Jazilul menjelaskan, baru-baru ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu dengan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bertemu di Makkah, Arab

Saudi, dalam rangka ibadah haji.

Menurutnya, pertemuan Cak Imin dan Muzani itu menunjukkan keakraban PKB dan Gerindra.

"Yang penting hubungan PKB dengan Gerindra ini ibarat hubungan lebah dengan bunga, saling menguntungkan," tuturnya.

Kemudian, Jazilul menyebutkan PKB masih kekeh mengunggulkan Cak Imin sebagai bakal calon presiden (capres). Nantinya, kata Jazilul, PKB dan Gerindra akan duduk bersama untuk menentukan siapa yang diusung sebagai capres.

Pasalnya, Gerindra menyatakan akan mengunggulkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto, untuk maju capres. ● mei

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Jumat/8 Juli 2022  
Waktu : Pukul 09.53 WIB – 10.46 WIB.  
Tempat : Friendly + Unique Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan untuk memfiksasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST**

DIREKSI :  
Direktur Independen : Bapak William

DEWAN KOMISARIS :  
Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto

**C. PEMIMPIN RUPST**  
RUPST dipimpin oleh Bapak Sumarwoto selaku Komisaris Independen.

**D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**  
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 676.515.250 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh) saham atau mewakili 93,96% (sembilan puluh tiga koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

**E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**  
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

**F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui e-ASY-KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Quorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) butir (a) bagian (j) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**  
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	676.515.250	Nihil	Nihil	676.515.250 (100%)	Ada
Kedua	676.515.250	Nihil	Nihil	676.515.250 (100%)	Ada
Ketiga	676.515.250	Nihil	Nihil	676.515.250 (100%)	Nihil
Keempat	676.515.250	Nihil	Nihil	676.515.250 (100%)	Nihil
Kelima	676.515.250	Nihil	Nihil	676.515.250 (100%)	Nihil

**H. HASIL KEPUTUSAN RUPST**

1. **Agenda Pertama Rapat :**  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. **Agenda Kedua Rapat :**  
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3. **Agenda Ketiga Rapat :**
  1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdijayanto, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
  2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
    - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
    - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
4. **Agenda Keempat Rapat :**
  1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. **Agenda Kelima Rapat :**
  1. Menyetujui untuk memfiksasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhutang sejak berakhirnya masa jabatan mereka sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini.
  2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhutang sejak ditulupnya Rapat ini yaitu tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ibu Susmaria Parlindungan  
Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Dody Hermawan S.Si.  
Direktur Independen : Bapak William
  3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menugaskan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 12 Juli 2022  
PT MINERAL SUMBERDAYA MINERAL Tbk.  
Direksi

## Cari Pengganti Lili Pintauli di KPK, Jokowi Minta Cepat Diajukan ke DPR

SUBANG (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau mengungkapkan siapa sosok pengganti Lili Pintauli Siregar, sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menyebut bahwa saat ini sosok pengganti Lili tengah dalam proses pembahasan.

"Masih dalam proses untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. karena kan baru saja surat pemberhentian minggu yang lalu sudah saya tandatangani dan ini masih dalam proses untuk penggantian," ujar Jokowi di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi), Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

Jokowi pun berjanji jika proses tersebut telah selesai, dirinya akan langsung menyerahkan nama calon pengganti Lili ke DPR.

"Kami akan segera mengajukan (penggantian) ke DPR. Secepatnya," ungkapnya.

Diketahui, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran etika Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar (LPS). Sebab, kata Dewas, Lili Pintauli sudah resmi mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama LPS dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat menggelar sidang etik di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Surat pengunduran diri Lili bahkan sudah diteken atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dewas KPK telah menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Lili sebagai pimpinan KPK.

"Maka terperiha (Lili) tidak lagi berstatus sebagai insan komisi," terangnya. ● han

## KPU Sebut Ada Penurunan Jumlah Pemilih Pada DPB Semester Pertama

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merilis hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) per semester Pertama tingkat Nasional pada Selasa (12/7) siang di Aula KPU RI lantai dua.

Dalam rilisnya, KPU membeberkan perubahan data pemilih dari semester kedua tahun 2021 menuju awal semester tahun ini, di 2022. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan data pemilih pada semester pertama kali ini alami penurunan jumlah pemilih.

"Hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada awal semester tahun 2022, kami menemukan penurunan data pemilih sejumlah 637.179 orang. Penurunan ini terjadi karena adanya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat," jelas Hasyim kepada wartawan.

Menurut Hasyim, data

total pemilih terakhir pada semester kedua tahun 2021 yakni 190.659.348 pemilih. Sedangkan di awal semester tahun 2022, lanjut Hasyim, terdapat 190.022.169 pemilih.

"Rekapitulasi DPB tetap kami lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. KPU melakukan pemutakhiran DPB di tingkat nasional setiap enam bulan sekali," ujar Hasyim.

Sebagai informasi, KPU mengumpulkan data pemilih terakhir berdasarkan 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7240 kecamatan, 83414 desa atau kelurahan dan 700.011 TPS. Adapun rincian pemutakhiran yang direkap yakni pertambahan pemilih baru sejumlah 578.139; Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 1.215.318 dan pemilih yang melakukan perubahan data sejumlah 818.302. ● mei